

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Putusan No.308/Pid.B/2011/PN.Mks)

OLEH:

IIN WAHYU PRIANI

B111 08 374

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Putusan No.308/Pid.B/2011/PN.Mks)

OLEH:

IIN WAHYU PRIANI

B111 08 374

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Putusan No.308/Pid.B/2011/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

IIN WAHYU PRIANI

B 111 08 374

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 22 November 2012
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

NIP : 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Amir Ilyas S.H., M.H.

NIP.19800710 200604 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : IIN WAHYU PRIANI

No. Pokok : B 111 08 374

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA

(Studi Kasus Putusan No.308/Pid.B/2011/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

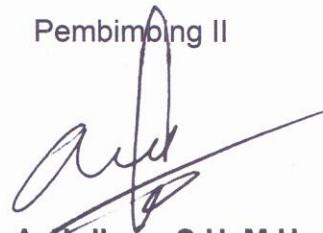
Makassar, Agustus 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
Nip. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
Nip. 19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IIN WAHYU PRIANI

NIM : B11108374

Bagian : Hukum Pidana

**Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, Agustus 2012

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng. S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRAK

IIN WAHYU PRIANI, NIM: B 111 08 374, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No. 308/Pid.B/2011/Pn.Mks) di bawah bimbingan Muhadar selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana yang terjadi pada kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan No. 308/Pid.B/2011/Pn.Mks dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada putusan No. 308/Pid.B/2011/Pn.Mks.

Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal di atas adalah penelitian kepustakaan dan penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan berupa wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 308/Pid.B/2011/Pn.Mks telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana materil maupun pidana formil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan khilaf, bila tulisan ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penulis sadari, untuk itu maka kritik dan saran sangat dinantikan sebagai saran pembelajaran dan media penyempurnaan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari motivasi dan doa dari ayahanda Supriyono Sunyo dan ibunda Sri Wahyuni Ngati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan tulus dan selalu mendoakan penulis juga selalu memberikan segala dukungan dan bantuan selama ini baik bantuan moril maupun yang tidak ternilai harganya.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi. Sp.B, Sp.BO (K) atas segala perhatian yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa pada almamater Universitas Hasanuddin.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bapak Prof. Dr. Aswanto S.H., M.S. DFM. dan para Pembantu Dekan I Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H. M.H, Pembantu Dekan II Dr. Anshori Ilyas, S.H, M.H, Pembantu Dekan III Romi Librayanto, S.H, M.H dengan segala perhatian dan bimbingannya.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen penguji, bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. serta bapak Abd. Asis, S.H., M.H. atas semua masukan dan ilmu yang berharga untuk penulis.
6. Kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan yang layak bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Civitas Akademika beserta seluruh jajarannya, terkhusus bagi Bapak Bunga selaku staf Akademik Angkatan 2008 yang sangat membantu penulis, memberikan dukungan moral dan tidak kenal lelah membantu penulis selama menjalani studi.

8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, dan selalu meluangkan waktunya selama penulis melakukan penelitian.
9. Chaerul Akbar, yang telah memberikan dukungan, nasehat, menjadi penyemangat serta senantiasa mendampingi dan membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Fermayanti Annas, Aulia Arindi Putri, Febriyana Iriansjah, S.H., Siti Haryati, Ayatul Asmaul Husna, Aprilia Zulkarnaen, Resky Amalia Hery, yang telah memberikan semangat dan menjadi teman seperjuangan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanaddin.
11. Teman-teman UKM Basket dan Garda Tipikor, Andi Amelia Bakti, Georgina Tirza, Faisal Mursyid, S.H., Ardiansyah Putra, Irwansyah, Danar S Fitriyadi, S.H., Ricla Astari, S.H., Ian Nuary Pratama, Andi Alamsyah, Dian Anugerah, S.H., Arifandi Alwi, S.H., Yudi Ahmad Achdan, S.H., Puji Ilmiyati, Novianti Letok, S.H., Astuti Aksan, S.H., Rozarya Ananda dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
12. Teman-teman NOTARIS 08, terkhusus kelas C dan D, Nuhu, Tari, Sagita, Tirsa, Eka, Asni, Anna, Anti, Oky, Madonk, Kyo, Nia, Shawir, Adi, Fadel, Arfan, Ono, Iqbal, Master, Akbar, Nario, Filky, Reza, Irfan, Cimi, Occank, Acong, Rahmat, Rusdi, dan teman-teman NOTARIS 08 lainnya.
13. Teman-teman KKN Angkatan 80 Kecamatan Sanrobone, Firdaus Fabrice, Riski Utami, S.H., Mirnawati, Risal, Saiful, Ria,

Lola, Sukma, Efraim, Nety, Icha, Arsyad, Pupung, Iccank, dan teman-teman KKN lainnya yang telah menjadi saudara selama menjalani KKN di Kecamatan Sanrobone, Takalar.

14. Kanda-kanda senior, Kak Wiwi, Kak Takdir, Kak Arie, Kak Opa, Kak Acca, dan kanda-kanda seniornya lainnya yang telah memberikan nasehat dan mengajarkan banyak hal kepada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Makassar, 2012

Iin Wahyu Priyani

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian	6
1. Tindak Pidana	6
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10
3. Lingkup Rumah Tangga	11
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana	11
C. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	14
D. Faktor – Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
E. Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
BAB III METODE PENELITIAN	25

A. Jenis dan Sumber Data	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Pengelolaan Analisa Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	27
A. Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	27
1. Posisi Kasus	27
2. Dakwaan Penuntut Umum	28
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	30
4. Amar Putusan	31
5. Komentar Penulis.....	32
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS	35
1. Pertimbangan Hakim.....	35
2. Komentar Penulis.....	39
BAB VPENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Tindak kekerasan yang paling sering terjadi di lingkup rumah tangga seperti pemukulan dan serangan fisik lainnya.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Di samping itu perkawinan adalah

merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang diharapkan untuk melestarikan keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan dalam masyarakat. Adapun hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Namun menurut Pudjijaganti (1993:2) pada kenyataannya institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi, citra fisik dan dalam hubungan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah; "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dan rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidakesesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, karena istri merupakan penampung emosi dari suami.

Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola hubungan di atas, yaitu bahwa suami sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mengasihi.

Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan sering terjadi di masyarakat. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan

dan tidak dilaporkan karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakannya dan dari pandangan publik. Penganiayaan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola. Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga dalam studi kasus putusan Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus putusan Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat.
2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi bentuk perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap tertib hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut "*delictium*" atau "*delicta*".

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons (P.A.F.Lamintang, 1997:185) merumuskan:

"*Strafbaarfeit*" atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Vos (Martiman Prodjohamidjojo, 1996:16) merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Wirjono Prodjodikoro (1981:50) menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak termasuk tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni:

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Didalam ilmu hukum pidana beberapa jenis tindak pidana yakni:

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana

tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

3. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa tindak adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

4. Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

5. Tindak Pidana Omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

6. Tindak Pidana Comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya (E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, 2002:74).

Moeljatno (1987:55) mengartikan kata *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut dengan kekerasan individu atau kolektif. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di dunia.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Zakariah Idris (1988:452) kekerasan adalah:

“perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.

Menurut Sukri (2004:7) kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai Hidden Crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri.

3. Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, ayahnya yang sah, istri atau anaknya.

Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan UU PKDRT, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa:
 - a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hamel (Amir Ilyas, 2012:49) menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni:

1. Perbuatan = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar "sengaja melakukan pembunuhan" karena ini lain dari pada "penganiayaan yang menyebabkan kematian". Van tidak menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan = perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Ada sifat melawan hukum

Amir ilyas (2012:53) menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualiaan-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

2. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Dapat dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur si pelaku antara 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain dari pada batasan umur si pelaku tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya).

b. Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksud adalah memang dari si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda seperti halnya perintah jabatan, keadaan paksa dan lain sebagainya.

C. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata tajam, dll. **Secara psikologis**, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan lain-lain. **Secara seksual**, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. **Secara ekonomi**, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi (Ende Hutabarat, 2004).

Selanjutnya jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Tindakan Kekerasan Fisik

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan,kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan,

pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Tindakan Kekerasan Psikis

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya,

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Tindakan Kekerasan Seksual

Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga lain.

Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 – 48 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dpada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Padal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang

tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

D. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri.

Moerti Hadiati Soeroso (2010:76). Menurut sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan karena menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan

anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.

Moerti Hadiati Soeroso (2010: 77) yang menyatakan bahwa tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong yang diperoleh dari penelitian pada tahun 1999. Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Ditambah lagi adanya biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

3. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau

terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak kandung maupun anak tiri atau anak angkat.

4. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak istri maupun suami dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, sering memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau mejelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

6. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan isteri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluar dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenaan di hati masing-masing pasangan harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7. Masalah masa lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realitas. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pedapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul

kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9. Suami mau menang sendiri

Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibanding dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam perintah, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

E. Akibat dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk berindak dan rasa tidak berdaya.
2. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
3. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
4. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin.

5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
6. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid).
7. Gangguan psikis berat (depresi, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang nafsu makan, kelelahan kronis, ketagihan alkohol dan obat-obatan terlarang).

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak:

1. Perilaku yang agresif atau marah-marah
2. Meniru tindakan kekerasan yang terjadi di rumah
3. Menjadi sangat pendiam dan menghindar
4. Mimpi buruk dan ketakutan
5. Sering tidak makan dengan benar
6. Menghambat pertumbuhan dan belajar
7. Menderita banyak gangguan kesehatan

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap masyarakat:

1. Siklus kekerasan akan terus berlanjut ke generasi yang akan datang
2. Anggapan yang keliru akan tetap lestari bahwa pria lebih baik dari wanita
3. Kualitas hidup manusia akan berkurang karena wanita tidak berperan serta dalam aktivitas masyarakat bila wanita tersebut dilarang berbicara atau terbunuh karena tindakan kekerasssan
4. Efek terhadap produktifitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya kontribusi terhadap masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja, dan cuti sakit bertambah sering

(<http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian,

serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti hakim.

2. Studi dokumen

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah-majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya dan peraturan perundang-undangan atau referensi lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh yakni, Data sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 308/Pid.B/2011/PN.Mks yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk menjawab putusan hakim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

1. Posisi Kasus

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Rajawali 1 Lrg 13 B Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban bernama Pr. Hajrah Sastrowijoyo alias Hajar (istri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh saksi korban supaya jangan selalu mabuk-mabukan setiap hari dan menyuruh terdakwa untuk pergi mencari uang tetapi terdakwa malah marah dan mengatakan itu adalah urusan saksi korban mendengar hal tersebut saksi korban menjadi emosi dan melempar terdakwa dengan kursi kecil lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul kearah wajah dan kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Sahrul Alias Cici yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Sahrul Alias Cici, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Rajawali 1 Lrg 13 B Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban bernama Pr. Hajrah Sastrowijoyo alias Hajar (isteri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh saksi korban supaya jangan selalu mabuk-mabukan setiap hari dan menyuruh terdakwa untuk pergi mencari uang tetapi terdakwa malah marah dan mengatakan itu adalah urusan saksi korban mendengar hal tersebut saksi korban menjadi emosi dan melempar terdakwa dengan kursi kecil lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul kearah wajah dan kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 021/VR/RSUDLB/I/2011, yang ditanda tangani oleh dr.H.Bambang Arya,M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban yang bernama Hajrah Sasrowijoyo, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Luka robek pada bibir atas bagian dalam P=1/2 cm, L=1/2 cm;
- Hematom/bengkak bibir atas dan bibir bagian bawah

Kesimpulan : berdasarkan keadaan luka penderita, kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sahrul Alias Cici, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap Pr. Hajrah Sastrowijaya alias Hajar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh saksi korban supaya jangan selalu mabuk-mabukan setiap hari dan menyuruh terdakwa untuk pergi mencari uang tetapi terdakwa malah marah dan mengatakan itu adalah urusan saksi korban mendengar hal tersebut saksi korban menjadi emosi dan melempar

terdakwa dengan kursi kecil lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul kearah wajah dan kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 021/VR/RSUDLB/I/2011, yang ditanda tangani oleh dr.H.Bambang Arya,M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban yang bernama Hajrah Sasrowijoyo, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Luka robek pada bibir atas bagian dalam P=1/2 cm, L=1/2 cm;
- Hematom/bengkak bibir atas dan bibir bagian bawah

Kesimpulan : berdasarkan keadaan luka penderita, kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, mendengar keterangan saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sahrul Alias Cici, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Sahrul Alias Cici, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong selama masa tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengadili terdakwa SAHRUL ALIAS CICI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahrul Alias Cici tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

5. Komentar Penulis

Bedasarkan putusan perkara No.308/Pid.B/2011/PN.MKS, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No.308/Pid.B/2011/PN.MKS telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami istri sehingga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan keterangan hikim berdasarkan hasil wawancara dengan Janverson Sinaga, SH (wawancara, 19 Juni 2012) yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga.”

Lebih lanjut keterangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Janverson Sinaga, SH (wawancara, 19 Juni 2012) menyatakan bahwa:

“Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif yang terdiri dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana itu sudah benar karena dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini adalah *lex specialis* dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah *lex generali*.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa terdakwa Sahrul alias Cici sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Bahwa terdakwa Sahrul alias Cici melakukan pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekitar

pukul 21.00 wita, di Jl. Rajawali 1 Lrg 13 B Makassar. Hal tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar tanggal 11 Januari 2011 Nomor 021/VR/RSUDLB/I/2011.

3. Dalam lingkup rumah tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar saksi korban Pr Hajrah Sastrowijoyo adalah istri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas saksi korban merupakan bagian dari lingkup rumah tangga sesuai yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 308/Pid.B/2011/PN.MKS telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai peryimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS.

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No. REG. PERK. : PDM- 248/Mks/Ep/02/2011 tanggal 16 Februari 2011 dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasebagai berikut:

Pertama : Bahwa ia terdakwa Sahrul Alias Cici, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010

bertempat di Jl. Rajawali 1 Lrg 13 B Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap saksi korban bernama Pr. Hajrah Sastrowijoyo alias Hajar (isteri terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh saksi korban supaya jangan selalu mabuk-mabukan setiap hari dan menyuruh terdakwa untuk pergi mencari uang tetapi terdakwa malah marah dan mengatakan itu adalah urusan saksi korban mendengar hal tersebut saksi korban menjadi emosi dan melempar terdakwa dengan kursi kecil lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul kearah wajah dan kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar tanggal 11 Januari 2011 Nomor: 021/VR/RSUDLB/I/2011, yang ditanda tangani oleh dr. H. Bambang Arya, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban yang bernama Hajrah Sasrowijoyo, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Luka robek pada bibir atas bagian dalam P=1/2 cm, L=1/2 cm;
- Hematom/bengkak bibir atas dan bibir bagian bawah

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan luka penderita, kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua : Bahwa ia terdakwa Sahrul Alias Cici, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap Pr. Hajrah Sastrowijaya alias Hajar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa masuk kedalam rumah dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh saksi korban supaya jangan selalu mabuk-mabukan setiap hari dan menyuruh terdakwa untuk pergi mencari uang tetapi terdakwa malah marah dan mengatakan itu adalah urusan saksi korban mendengar hal tersebut saksi korban menjadi emosi dan melempar terdakwa dengan kursi kecil lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul kearah wajah dan kepala saksi korban lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi korban terjatuh dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 021/VR/RSUDLB/I/2011, yang ditanda tangani oleh dr. H. Bambang Arya, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban yang bernama Hajrah Sasrowijoyo, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Luka robek pada bibir atas bagian dalam P=1/2 cm, L=1/2 cm;
- Hematom/bengkak bibir atas dan bibir bagian bawah

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan luka penderita, kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa Sahrul alias Cici telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi penasehat hukum.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, atas pernyataan hakim, terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah: 1. Hajrah Sastrowijoyo dan 2. Nasir Lappe yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan seperti termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang meberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada istrinya yang seharusnya dilindungi

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa dengan Hajrah Sastrowijoyo sudah berdamai

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan, dinilai hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan diuraikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara.

2. Komentor Penulis

Dari pertimbangan hakim di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan hakim Janverson Sinaga, SH (wawancara, 19 Juni 2012), menyatakan bahwa:

“Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan memberikan pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu perlu juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang diterapkan, apabila telah memenuhi semua unsur maka harus dipidana.”

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP).

Sebelum menjatuhkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2011 menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Sahrul Alias Cici telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahrul Alias Cici tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar.

Dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

2. Bahwa dalam penjatuhan putusan dalam perkara Nomor 308/Pid.B/2011/PN.MKS majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.
2. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak kekerasan yang menimpanya, serta

tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga yang harus ditutupi.

3. Untuk masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat lainnya yang belum mengetahui mengenai undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hutabarat, Ende. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rafika Aditama, Bandung.
- Idris, Zakariah. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Ihromi, Tapi Omas. 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Penerbit Alumni Bandung, Bandung.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pudjijangyanti. 1993. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Alumn, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. PT . Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sukri, S. 2004. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Gama Media, Yogyakarta.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- (<http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga/>)